

ANALISIS TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KARANTINA
PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN

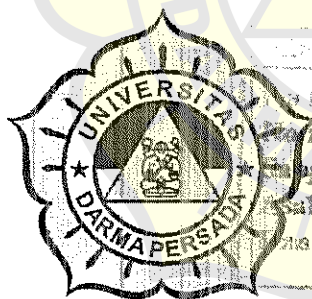
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Oleh :

LAMSIHAR SILALAH

NIM : 02420910



UNIVERSITAS DARMA PERSADA

No. Induk	:	13/SER-PED/05-07
No. Aktas	:	650-577-00
Subjek	:	AKUNTANSI - LAP
Nama	:	LAMSIHAR - S
Tgl. Pengantar	:	20/9-06

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JAKARTA
2005

TIDAK BOLEH
DICOPY

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul

**ANALISIS TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
BADAN KARANTINA PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN**

Oleh

Nama : Lamsihar Silalahi

Nim : 02420910

Program Studi : Akuntansi

Telah disetujui untuk diujikan

Jakarta, Juli 2005

Dosen Pembimbing Teknis

Dosen Pembimbing Materi



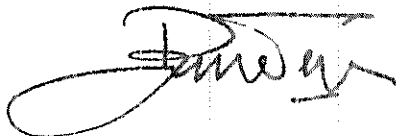
(Ir. Sahala Sianturi S. MM)



(Denny Irwana, SE. Ak, MM)

Mengetahui.

Ketua Jurusan



(Denny Irwana, SE. Ak, MM)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lamsihar Silalahi
NIM : 02420910
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Program Studi : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Analisis terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Badan Karantina Pertanian Departemen
Pertanian

Telah diperiksa, dikaji dan diujikan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Sarjana
Fakultas Ekonomi pada hari Rabu 10 Agustus 2005 pukul 13.00 dengan hasil B

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Drs. Soenarto Widodo, AK.MM	Ketua
2. Drs. Haryanto, AK.MM	Anggota
3. Drs. Boedi Setyo Hartono, AK.MM	Anggota

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lamsihar Silalahi

No. Pokok : 02420910

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul “ANALISIS TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KARANTINA PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN.” Di bawah bimbingan Ir. Sahala. S, MM, benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan maupun mengcopy dari sebagian dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang menyatakan,

(Lamsihar Silalahi)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH Bapa dan Putra dan Roh Kudus atas Berkah dan KaruniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa ada kekurangan apapun. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk melengkapi gelar Sarjana Ekonomi Jenjang Pendidikan Strata Satu dengan Program Studi Akuntansi pada Universitas Darma Persada Jakarta.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan didalam pembahasan skripsi ini. Namun dalam kekurangan itu, penulis berharap para pembaca akan tertarik dengan pembahasan masalah ini dan dapat memberikan kritikan dan saran sebagai masukan ataupun melakukan pembahasan lebih dalam mengenai pokok permasalahan ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada

1. Bapak Denny Irwana, SE.Ak, MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
2. Ibu Dra. Sri Ari Wahyuningsih, MM selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
3. Bapak Ir.Sahala S. MM selaku dosen pembimbing teknis yang telah mengerahkan tenaga serta pikirannya untuk membantu dalam penyusunan materi skripsi ini.
4. Bapak Denny Irwana, SE.Ak, MM selaku dosen pembimbing materi yang membantu dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat memenuhi kaidah-kaidah baku penulisan karya ilmiah.
5. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada.
6. Bapak Drs. Sunandi, MM selaku Kepala Subbagian Rumah Tangga Sekretaris Badan Karantina Pertanian.
7. Segenap keluarga tercinta, Bapak, Mama, serta saudaraku tersayang, keluarga abang Bernad, kakak Yuni, abang Monang,

abang Anto, adikku Lisbet, yang telah memberikan dukungan moral maupun material serta doa tulus penuh pengharapan.

8. Kepada yang tersayang Rita beserta keluarga yang telah memberikan dukungan moral.
9. Untuk abang Bapak Dio Sipayung, naboru Friska, abang Sangab Sipayung, Kel. Lae Situmorang, appara Pangihutan dan Keluarga Besar Sipayung Raja dohot Boru dan Bere Sejabodetabek yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material.
10. Jaya, Adian, Tulang Sagala, Eko, lae Boni, teman-teman di Batako dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi Pemerintahan Daerah di Kampus Darma Persada.



Jakarta, Juli 2005

Penulis,

Lamsihar Silalahi

ABSTRAKSI

- (A) LAMSIHAR SILALAH (02420910)
- (B) ANALISIS TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KARANTINA PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN
- (C) ix + 79 halaman ;1987-2003 ; 3 Gambar ; Lampiran 2005
- (D) **Kata Kunci** : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Karantina Pertanian
- (E) **Alasan dan Tujuan Penelitian** : Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan, dalam rangka itu pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawas dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.
- Metode Penelitian** : Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan wawancara langsung dan mengadakan observasi kepada pejabat dan karyawan terkait, serta menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan.
- Hasil Penelitian** : (1) Barantan telah menyusun perencanaan strategik sesuai Inpres No.7 tahun 1999, sedang dari 4 (empat) unit kerja eselon II lingkup Barantan hanya 1 (satu) yang menyusun LAKIP. (2).sistem pengukuran kinerja belum terselenggara dengan baik. (3) analisis capaian kinerja beberapa kegiatan belum maksimal.
- Kesimpulan dan Saran** : Secara umum, Barantan sebagai instansi pemerintah setingkat Eselon I telah menerapkan SAKIP meskipun belum sepenuhnya sepenuhnya sesuai dengan pedoman. (2)Rencana Strategis (Renstra) yang disusun Eselon I Barantan belum sepenuhnya tepat. (3) rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 54% atau kategori kurang berhasil.
- (F) **Daftar Pustaka**, 9. **Daftar perundangan**, 6 (1987-2003)

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Pembatasan Masalah	5
1.2.3 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Peneitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Data Penelitian	8
1.5.3 Analisis Data	8
1.6 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	12
2.2 Pengertian Akuntabilitas	14
2.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas	16

2.4	Perencanaan Stratejik.....	17
2.5	Perencanaan Kinerja.....	22
2.6	Pengukuran Kinerja.....	25
2.7	Pelaporan.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1	Sejarah dan Latar Belakang Instansi	42
3.2	Struktur Organisasi	50

**BAB IV ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA BADAN KARANTINA PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN**

4.1	Analisis SAKIP	54
4.1.1	Perencanaan Stratejik (Renstra)	54
4.1.2	Pengukuran Kinerja	57
4.2	Analisis Penyusunan LAKIP	60
4.3	Analisis Capaian Kinerja Beberapa Kegiatan.....	63

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	75
5.2	Saran	77

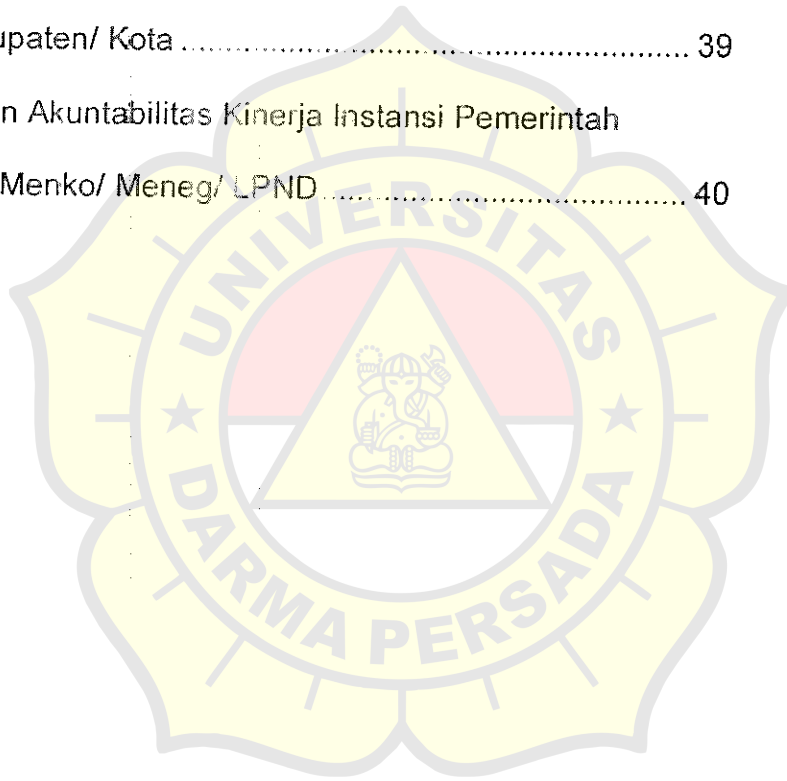
DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Penyimpulan Hasil Evaluasi	29
Gambar 2	Alur Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Profinsi/ Kabupaten/ Kota	39
Gambar 3	Alur Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Departemen/ Menko/ Meneg/ LPND	40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sesuai Inpres No.7 Tahun 1999 tersebut, maka setiap instansi pemerintah setingkat Eselon II keatas diwajibkan menyusun LAKIP dimana prosedur penyusunannya mengacu pada pedoman yang ditetapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggungjawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat umum perlu adanya akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur, sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah juga diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk dapat dipertanggungjawabkan mandat/kewenangannya kepada masyarakat/publik melalui lembaga perwakilan.

Sebagaimana perkembangan terakhir terjadi, setelah ditetapkan TAP MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, menetapkan tatanan baru yaitu, bahwa Presiden dan Lembaga Tinggi mempertanggungjawabkan pelaksanaan GBHN dalam sidang tahunan MPR. Ini berarti Presiden harus menyusun laporan akuntabilitas setiap tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan dari disusunnya LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah. Oleh karena itu pelaporan

LAKIP sebagai perwujudan dari salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanatkan kepada setiap manajer/pejabat publik.

LAKIP sangat penting dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait. Untuk tahap awal LAKIP ini dapat dipakai sebagai alat perbaikan manajemen di lingkungan instansi pemerintah sebagai bagian dari *good governance*. Pada lingkup pemerintahan LAKIP dapat membantu Presiden untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Lembaga Perwakilan Rakyat.

Bagi instansi pemerintah sendiri yang memberikan akuntabilitasnya kepada pemberi mandat, jika akuntabilitas itu diterima, media ini dapat dipakai alat belajar untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan mandat secara lebih akuntabel. Pada gilirannya nanti informasi dalam LAKIP bisa digunakan sebagai media akuntabilitas kepada publik.

Dari uraian tersebut diatas, LAKIP sebagai media pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah menjadi sangat penting dan strategis sehingga perlu pencermatan melalui suatu analisis terhadap LAKIP suatu instansi pemerintah setingkat Eselon II di Departemen Pertanian yaitu Badan Karantina Pertanian dengan judul **ANALISIS TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KARANTINA PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN.**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana pedoman penyusunan LAKIP di Implementasikan di Departemen Pertanian, khususnya pada Badan Karantina Pertanian (Barantan) dalam hubungannya dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)?
- b. Bagaimana cara menghadapi hambatan dalam proses penyusunan LAKIP ?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban setiap Unit Kerja dalam proses penyusunan LAKIP ?
- d. Bagaimana tingkat akurasi nilai capaian kinerja kegiatan yang disajikan dalam LAKIP instansi ?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Karena pedoman penyusunan LAKIP sangat luas cakupannya maka dalam pembahasan penelitian ini, penulis membatasi masalah hanya pada analisis beberapa komponen materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian TA. 2003. Pemilihan LAKIP TA. 2003 disebabkan LAKIP Barantan TA. 2004 belum selesai dibuat (masih dalam tahap *review* akhir). Adapun fokus analisis adalah terhadap komponen

penerapan SAKIP, penyusunan LAKIP dan pengujian capaian kinerja beberapa kegiatan yang disajikan pada LAKIP Barantan TA. 2003.

1.2.3 Perumusan Masalah

- a. Apakah SAKIP telah diterapkan pada Barantan ?
- b. Apakah penyusunan LAKIP telah dilaksanakan dengan baik pada Badan Karantina Pertanian di Departemen Pertanian TA. 2003 ?
- c. Apakah capaian kinerja beberapa kegiatan yang disajikan pada LAKIP telah sesuai kondisi sebenarnya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP oleh Barantan.
- b. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penyusunan LAKIP di Badan Karantina Pertanian pada Departemen Pertanian TA. 2003 dikaitkan dengan pedoman penyusunan LAKIP.
- c. Untuk mengetahui seberapa jauh capaian kinerja beberapa kegiatan Badan Karantina Pertanian.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk mendapat pemahaman mengenai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyusunan sebagai media pertanggungjawaban.
- b. Sebagai bahan acuan bagi pihak pembaca yang berkepentingan dalam memahami analisis LAKIP.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang diteliti untuk penerapan SAKIP dan penyusunan LAKIP dengan prinsip-prinsip laporan yang baik.
- d. Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan penelitian bagi peneliti berikutnya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini meliputi dua jenis penelitian yaitu riset kepustakaan dan riset lapangan.

- a. Riset kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, dokumen pertanggungjawaban instansi Barantan, laporan-laporan kegiatan dan referensi lainnya yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.
- b. Riset lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pejabat terkait untuk memperoleh penjelasan tertulis.

1.5.2 Data Penelitian

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan sekunder, hal ini akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari instansi antara lain LAKIP yang diteliti oleh penulis dan wawancara dengan pejabat serta pegawai yang terkait.
- b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur-literatur berupa buku bacaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

1.5.3 Analisis Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi dua jenis analisis yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menguji tingkat capaian kinerja beberapa kegiatan yang tertuang dalam LAKIP Badan Karantina Pertanian TA. 2003.
- b. Analisis kualitatif yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai analisis terhadap penerapan SAKIP, proses penyusunan dan materi LAKIP Badan Karantina Pertanian dibandingkan dengan pedoman atau standar yang berlaku.

1.6 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi, penulis akan menguraikan skripsi ini dengan sistematika pembahasan, agar lebih memudahkan dalam pemahaman sehingga dapat dirinci dan tersusun dengan baik. Sistematika pembahasan secara singkat adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pandangan umum dari penulis skripsi yang mengemukakan latar belakang, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang mendasar yang berhubungan dengan permasalahan yang

akan diteliti. Bab ini meliputi antara lain pengertian *good governance*, akuntabilitas serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu : perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian di instansi pemerintah setingkat Eselon I yaitu: Badan Karantina Pertanian pada Departemen Pertanian yang meliputi gambaran umum objek penelitian yang mencakup sejarah singkat dan latar belakang instansi, struktur organisasi, visi dan misi organisasi serta kebijakan dan sasaran organisasi.

BAB IV : ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA BADAN KARANTINA PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN

Bab ini akan menguraikan tentang analisis penerapan SAKIP, penyusunan LAKIP dan pengujian capaian kinerja beberapa kegiatan pada Barantan sebagai Instansi pemerintah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini, yang menguraikan kesimpulan dari seluruh uraian bab-bab sebelumnya dan penulis akan mencoba memberikan saran-saran yang berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi instansi pemerintah khususnya Barantan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

